

PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERSUMBER ANGGARAN PEMBIAYAAN NEGARA

Jose Ato Mau

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang
Email: tunggalmute@gmail.com

Abstrak: Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), di Suco Meligo Administrador Sub-distrito Cailaco Distrito Bobonaro. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Suco. 2) mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Peranan pembangunan di Suco Meligo Administrador Sub-distrito Cailaco Distrito Bobonaro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam peranan Komunikasi Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan suco, di Suco Meligo Administrador sub-distrito Cailaco Distrito Bobonaro. Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan peranan Komunikasi Pemerintahan terhadap partisipasi Masyarakat sangat mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat suco, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai peran Komunikasi pembangunan.

Kata Kunci : Peran Komunikasi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat dan pembangunan

***Abstract:** communication to public participation in rural development in Meligo Cailaco Bobonaro, the role of development, characteristics of participatory role. The purpose of study are: 1) to describe and analyze the role of Government Communications for Public Participation in rural Development. 2) to describe and analyze the role of community participation in the rural development of Meligo Cailaco District of Bobonaro. The method of this study apply qualitative research approach with the main objective study is to describe or interpret in detail and in depth interview. To make it necessary complete stages role for the Government Communications Public participation is very optimize to identify all of the problems and it needs of the community participation, and the need to increase understanding of the village, building elements and elements of society Communication on the role of development.*

***Keywords,** The Role of Communication To Public Participation and Rural Development*

PENDAHULUAN

pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterkan masyarakat demikian halnya dengan Negara Timor Leste. Dalam Kontitusi Republika Timor Leste tahun (RDTL) 2002 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional *Nasaun* Timor Leste adalah melindungi segenap bangsa Timor Leste, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Timor Leste seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi alam harus

digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Bebagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah Suco Meligo yang baik oleh pemerintah pusat melalui instansi-instansi vertikal di daerah manapun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara non pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga diperlukan

kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Kemerdekaan yang dicapai Nasaun Demokratika de Timor Leste (RDTL) merupakan Jembatan Menuju terwujudnya tujuan nasional yaitu Masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir maupun batin. Untuk mewujudkan tujuan nasional maka dilaksanakan *desenvolvimento* nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan/*desenvolvimento* Masyarakat Timor Leste. Pembangunan/*desenvolvimento* Manusia seutuhnya berarti *desenvolvimento* yang dapat menyentuh kebutuhan dari segala aspek kehidupan masyarakat serta hasil harus benar-benar dinikmati seluruh warga negara Timor Leste.

Pada Hakekatnya tujuan Pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Republika Democratica de Timor Leste (RDTL) dalam Pembukaan Konstitusi RDTL 2002 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional Bangsa Democratica de Timor Leste, adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan keterlibatan dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Timor Leste seutuhnya pembangunan masyarakat seluruhnya. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat suco maka segala program peran pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun diwilayah suco meligo sebab merekalah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di suco/desa meligo. Menurut Tjokroamidjojo (1995:8) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan (1) peranan pembangunan berbagai kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya, (2) peranan perubahan sosial yang merupakan prananan perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya kearah yang lebih baik dan adil. (3) peranan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.

Dari uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam peranan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan untuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam peranan mempunyai sifat sangat penting, (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. (2) Masyarakat akan lebih mempercayai program atau kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan proses peran komunikasi pembangunan yang akan dilaksanakan. (3)

Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan suco.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang luas dan mendalam mengenai Peran Komunikasi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat. (studi kasus di Suco Meligo Administrador Sub-distrito Cailaco distrito Bobonaro).

Dasar penelitian yang digunakan adalah, observasi dan wawancara secara langsung, yang akan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang akan dijadikan subyek penelitian yang dianggap untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini memfokuskan pada proses, deskripsi, analisis, dan pemberian makna pada komunikasi pemerintahan. Penelitian ini kemudian diuraikan ke dalam subfokus penelitian, yaitu Peran Komunikasi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Permasalahan yang ditentukan sebelumnya merupakan pedoman dalam menentukan fokus penelitian. Dalam praktik lapangan fokus penelitian kemungkinan akan berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan dari hasil temuan di lapangan. Seperti diungkapkan Moleong (2000), bahwa penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya bersifat fleksibel dan *subject to change*, sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

Sifat lentur terhadap perkembangan maupun perubahan ketika di lapangan merupakan sifat pendekatan kualitatif yang adaptif disesuaikan dengan kondisi dan situasi riilnya. Kelenturan ini karena mengikuti pola pemikiran yang bersifat "*empirical inductive*", sehingga dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan sesungguhnya di lokasi penelitian. Menetapkan fokus penelitian sebelum ke lapangan merupakan arahan agar peneliti tidak terjebak pada persoalan-persoalan diluar tujuan penelitian. Moleong (2002), menyatakan:

PEMBAHASAN

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan bantuan pembangunan *Suco*/desa serta penilaian atau evaluasi hasil pengelolaan bantuan pembangunan *Suco*/desa. Perencanaan Sehubungan dengan itu dalam menyusun rencana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pada tahap permulaan, Pemerintah *suco* terutama *Chefe do suco* mengajak bersama-sama dalam mengadakan rapat lengkap, guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan rencana proyek yang bersumber dari bantuan pembangunan sucoa. Proyek yang direncanakan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan prioritas pembangunan desa.
- b. Rencana yang telah disusun oleh Pemerintah Suco/desa bersama-sama ditetapkan menjadi Keputusan *chefe do suco*
- c. Setelah ditetapkan menjadi keputusan selanjutnya rencana tersebut dibuat dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP), yang akan diajukan kepada Administrador Distrito melalui Administrador sub-distrito untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya proyek bantuan pembangunan suco dapat dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka

terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: *pertama*, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. *Kedua*, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun. Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan. Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat Suco Rurais(masyarakat daerah terpencil) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana,dan teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan)
- c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efesiensi)

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Dwipayana (2003:81), partisipasi menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. *Yang pertama*, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan *kedua*, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakkan demokrasi, manjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Muncul apabila mereka

dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal. Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Tjokromidjojo, 2002). Menurut Taliziduha Ndraha ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud seperti rapat tiap bulan di suco/desa, seminar, penataran-penataran.
2. Wadah partisipasi tenaga.
Yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab.
3. Wadah partisipasi benda. Dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi Membangun Gedung Suco.
4. Wadah partisipasi keterampilan. Di suco banyak yang memiliki keterampilan, tetapi belakang ini mengalami skill drain, karena mereka telah mengalir ke kota. Dilihat dari pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu:
 - a. Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendakinya baik diantara alternatif pemerintah maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri.
 - b. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
 - c. Partisipasi dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat suco

Partisipasi yang melibatkan warga desa adalah menyangkut keikutsertaan yang bertalian dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari segi moral ataupun material. Ikut menyumbang ide-ide, peduli terhadap pembuatan keputusan dan hasil keputusan, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Suco dan senantiasa menunaikan kewajibannya selaku warga Negara yang baik yaitu dengan membayar pajak yang berguna pendanaan pembangunan di desa itu sendiri pada khususnya maupun untuk pembangunan Negara ada umumnya merupakan sedikit contoh bagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat yang harus dilakukan. Selanjutnya partisipasi masyarakat suco dalam pembangunan yang sering diabaikan dan hampir tidak kelihatan adalah partisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal

ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintahan itu sendiri baik dari level yang paling atas (pemerintah pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada *chefe do suco*. Pengambilan keputusan ini seringkali tidak melibatkan masyarakat *suco* sehingga pada tiap-tiap desa untuk wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat.

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa yang menentukannya, bagaimana proses penentuannya serta bagaimana diimplementasikannya agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan berpihakan publik, maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu harus ada rumusan ataupun strategi yang di ciptakan guna melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang bersifat langsung melibatkan kepentingan *suco* dan masyarakat desa itu sendiri.

Hidayat (2004:74) membuat strategi perencanaan bersama masyarakat yaitu melalui serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat berusaha menguatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengupayakan kerjasama/kemitraan yang lebih erat antar berbagai pelaku pembangunan (pemerintah *suco* dan Masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan daerah. Strategi perencanaan masyarakat yang dilakukan adalah untuk menjadikan partisipasi masyarakat bukan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan alasan kebaikan hati melainkan dimaksudkan sebagai suatu pelayanan dasar yang tersedia dan bagian yang menyatu dalam pengelolaan pembangunan daerah di era ini. Adapun tujuan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi antara lain mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan antara masyarakat dengan pemerintahannya, mendorong masyarakat dan aparat pemerintah secara bersama-sama untuk mencapai jalan keluar dari berbagai masalah umum yang mereka hadapi, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan demokratisasi, membangun kapasitas lokal untuk mendorong pengelolaan pembangunan daerah secara partisipatif, sebagai hasil dari pendekatan yang diupayakan. Untuk itu keterlibatan antara kedua belah pihak ini (Aparat pemerintah dan masyarakat) dalam pembangunan sangatlah di butuhkan guna kemajuan bersama sebagai bentuk orientasi dari pembangunan.

Komunikasi pemerintahan dalam penelitian ini adalah suatu konsep atau *construct* yang memiliki beberapa aspek/dimensi, yaitu penyampaian pesan sarana atau sediaan gangguan pesan dan efek komunikasi yang diajukan untuk seluruhnya berjumlah 18 pernyataan, dan disebarkan kepada 16 responden.

Dari hasil pengolahan data primer di atas, total skor jawaban responden terhadap 5 pernyataan tentang penyampaian pesan berada pada batasan sikap negatif, dimana total skor jawaban responden tersebut. Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat diinterpretasikan secara umum cenderung menilai dan menyetujui bahwa penyampaian pesan sebagai salah satu bagian dari keberhasilan komunikasi kurang terwujud. Hasil wawancara ini dapat diungkapkan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama, diperlukan kemampuan khusus bagi aparat pemerintahan kelurahan dalam menyampaikan pesan dan informasi yang berkaitan dengan bantuan pembangunan desa/kelurahan. Dimana dari hasil jawaban responden memilih jawaban respon yang memberikan respon tertinggi.

Kedua, Penyebaran informasi yang berkenaan dengan bantuan pembangunan desa, dari hasil pengolahan data nampaknya bahwa alternatif terbanyak, yakni hal ini bermakna bahwa penyebaran informasi masih dianggap kurang merata dan adil kepada masyarakat.

Ketiga, Kebenaran dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai bantuan pembangunan desa masih kurang, terhadap pernyataan ini responden cenderung menilai dan menyetujui hal tersebut.

Penyampaian pesan dalam proses komunikasi bermaksud agar sipenerima pesan (komunikator) dan sipenerima pesan (komunikan) sama-sama setala (*tuned*) untuk suatu pesan, (Schraam, 1986 : 28). Oleh karena itu pesan harus dirumuskan dengan baik dalam bentuk kata-kata lisan ataupun tertulis, kecermatan dalam memilih kata-kata yang tepat dan dapat dipahami (bahasa dan istilahnya), kemudian pesan disampaikan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan Inpres bantuan pembangunan Suco, biasanya informasi yang disampaikan berkenaan dengan perencanaan atau apa yang akan dilaksanakan, setelah itu bagaimana pelaksanaan proyek bantuandesmvolvimento suco tersebut dan bagaimana masyarakat seharusnya berbuat. Disamping hal itu juga disampaikan pesan-pesan yang dapat membangkitkan partisipasi masyarakat, kendala-kendala dalam pengelolaan Inpres bantuan desemvolvimento suco dan juga mengenai dana yang diterima.

Berkaitan dengan uraian di atas, dari hasil wawancara dan observasi dapat diungkapkan bahwa dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan Inpres bantuandesemvolvimento suco, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyampaikan informasi itu kepada masyarakat atau dengan kata lain memasyarakatkan informasi tentang pengelolaan bantuan pembangunan Suco.

Dalam proses penyampaian informasi yang dalam penelitian ini adalah informasi mengenai pengelolaan Inpres bantuan pembangunan *Suco*, realitasnya masih rendah, dimana informasi atau pesan itu intensitas dan penyebarannya kepada masyarakat *Suco* . Meligo diakui masih kurang sering, kurang merata dan adil kepada masyarakat, artinya tidak semua masyarakat menerima informasi tentang pengelolaan bantuan pembangunan *Suco* tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil akhir penelitian tentang Peranan Pemerintah suco untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan suco disuco Meligo

Peranan Pemerintah suco untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pemerintah suco meligo telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan suco dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat suco Meligo.

Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya disuco Meligo berdasarkan hasil penelitian belum maksimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun Responsavel suco sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah suco belum mencapai sasaran dan tujuan daripada pembangunan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, masyarakat desa meligo belum merasakan peran pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat dan adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

SARAN

- a. Disarankan untuk dapat menggerakkan peran komunikasi terhadap pembangunan, sebaiknya harus memperhatikan komunikasi pemerintahan (dari chefe do Suco/desa), maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat pada penelitian komunikasi pemerintahan dalam menggerakkan pembangunan di suco Meligo atas Suatu study peranan chefe do suco.
- b. Disarankan dalam menggerakkan pembangunan dalam berkomunikasi, komunikator harus dapat dipercaya dan juga keterbukaan dalam berkomunikasi tentang peran pemerintahan dalam desenvolvimento suco hal ini sudah terlihat pada hasil penelitian "Peran komunikasi pemerintahan terhadap partisipasi Masyarakat dalam desenvolvimento Suco.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, Harun, 1994, *Statistika Sosial*, penyunting Krismantoroadji, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bintarto, R., 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bryant, Coralie and White, Leuise G. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*; Diterjemahkan Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Bunasor, 1992. *Pembangunan Pedesaan Gerakan dari Bawah dan Partisipasi Masyarakat*, Media Baru. Jakarta.
- Cohen, John M., and Norman, T, Uphoff 1987. *Rural Development Participation*, Cornell University, New York.
- Conyers, Diana, 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Diterjemahkan oleh Susetiawan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Cernea, Michael M, 1998, *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*, Penerjemah Basiliv Bengo Teku, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Depari, Edward dan Colin MacAndrews, 1985, *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- _____, 1999, *Teori Sosial dan Pembangunan Indonesia*, CV. Primaco Akademika, Bandung
- _____, 1999, *Paradigma Sosial Budaya Dalam Pengembangan Masyarakat*, Makalah, Bandung